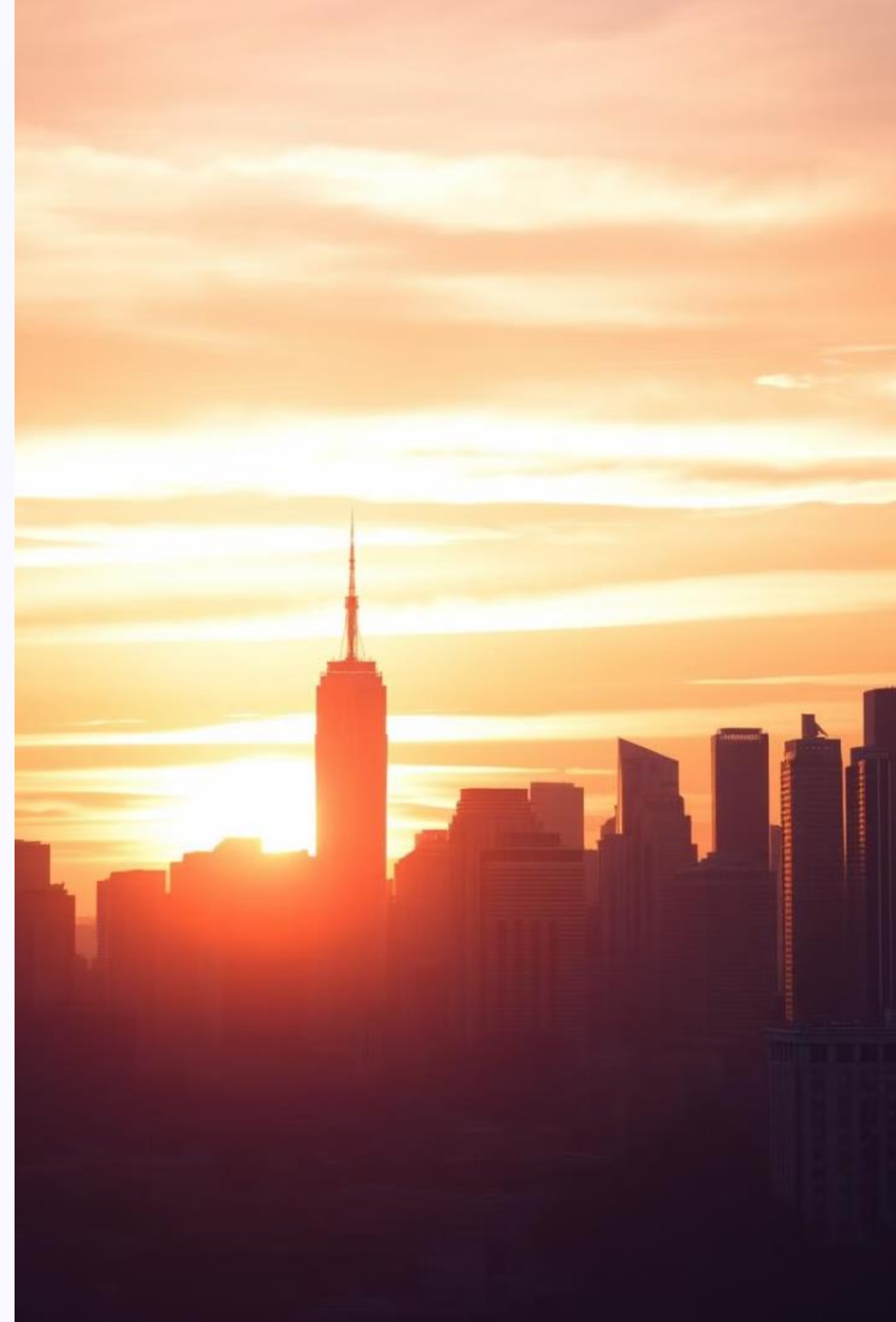


Manajemen Publik: Sejarah, Definisi, Konsep, dan Tujuan

Manajemen publik adalah disiplin ilmu yang penting untuk memahami dan mengelola urusan publik. Materi ini akan membahas 1) sejarah, 2) definisi, 3) konsep, dan 4) tujuan manajemen publik, serta contoh-contoh penerapannya dalam praktik.

Vina Karmilasari, S.Pd.,M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila



1. Sejarah Kemunculan Manajemen Publik

1. Era Pra-Modern

Administrasi publik bersifat tradisional dan hierarkis, seperti dalam sistem kerajaan atau kekaisaran. Fokusnya adalah pada pengelolaan sumber daya untuk kepentingan penguasa.

2. Era Modern (Abad 19-20)

Munculnya revolusi industri dan perkembangan negara modern mendorong kebutuhan akan sistem administrasi yang lebih terstruktur. Woodrow Wilson (1887) memperkenalkan konsep "Administrasi Publik" sebagai ilmu yang terpisah dari politik dan penekanan pada pentingnya efisiensi dan profesionalisme dalam pelayanan public.

3. Era Pasca-Perang Dunia II

Manajemen publik berkembang sebagai respons terhadap kompleksitas pemerintahan modern. Fokusnya bergeser dari administrasi ke manajemen yang lebih strategis, termasuk perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan.

1. Sejarah Kemunculan Manajemen Publik-lanjutan

4. Era New Public Management (NPM)

Pada tahun 1980-an dan 1990-an, muncul gerakan New Public Management yang menekankan pada efisiensi, privatisasi, dan pendekatan berbasis pasar dalam pelayanan publik. Tokoh mempopulerkan era ini Osborne dan Gaebler dalam buku *Reinventing Government* (1992).

5. Era Kontemporer

Saat ini, manajemen publik terus berkembang dengan memasukkan konsep-konsep seperti tata kelola yang baik (good governance), partisipasi publik, dan inovasi digital



2. Definisi Manajemen Publik

Nicholas Henry

Manajemen publik adalah seni dan ilmu mengarahkan sumber daya manusia dan material untuk mencapai tujuan publik.

Owen E. Hughes

Manajemen publik adalah proses mengelola organisasi publik dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada hasil.

Dwight Waldo

Manajemen publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melayani kepentingan publik.

Manajemen publik dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya (manusia, keuangan, dan fisik) dalam organisasi publik untuk mencapai tujuan pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien

3. Konsep dan Teori dalam Manajemen Publik

1 Teori Birokrasi (Max Weber)

Menekankan pentingnya struktur hierarkis, aturan formal, dan profesionalisme dalam organisasi publik.

3 New Public Management (NPM)

Menekankan efisiensi, desentralisasi, dan pendekatan berbasis pasar dalam pelayanan publik.

5 Public Value Theory (Mark Moore)

Fokus pada menciptakan nilai publik melalui strategi yang inovatif dan kolaboratif.

2 Teori Administrasi Publik Klasik (Henri Fayol)

Fayol mengemukakan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

4 Good Governance

Konsep ini menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dalam pengelolaan urusan publik.

6 Network Governance

Menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Konsep dan Teori dalam Manajemen Publik

1 Teori Birokrasi (Max Weber)

Menekankan pentingnya struktur hierarkis, aturan formal, dan profesionalisme dalam organisasi publik.

Max Weber, seorang sosiolog Jerman, mengemukakan teori birokrasi sebagai bentuk ideal organisasi yang efisien dan rasional. Menurut Weber, birokrasi memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Hierarki yang Jelas: Struktur organisasi yang teratur dengan garis komando yang tegas.
2. Aturan Formal: Prosedur dan regulasi yang jelas untuk mengatur tindakan.
3. Spesialisasi: Pembagian kerja berdasarkan keahlian.
4. Impersonalitas: Hubungan kerja didasarkan pada peran, bukan kepribadian.
5. Karir Berbasis Merit: Promosi berdasarkan kemampuan dan kinerja, bukan favoritisme.

Contoh: Sistem birokrasi pemerintah Indonesia, seperti Kementerian Keuangan, yang memiliki struktur hierarkis, aturan formal, dan spesialisasi dalam pengelolaan anggaran negara.

Kritik: Teori ini sering dikritik karena dianggap kaku dan kurang responsif terhadap perubahan.

3. Konsep dan Teori dalam Manajemen Publik

2

Teori Administrasi Publik Klasik (Henri Fayol)

Henri Fayol, seorang insinyur Prancis, mengembangkan teori administrasi klasik yang menekankan fungsi-fungsi manajemen:

1. Perencanaan: Menetapkan tujuan dan strategi.
2. Pengorganisasian: Mengatur sumber daya dan struktur organisasi.
3. Pengarahan: Memimpin dan memotivasi karyawan.
4. Pengendalian: Memantau dan mengevaluasi kinerja

Fayol mengemukakan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

Contoh: Pemerintah daerah yang merencanakan pembangunan infrastruktur (perencanaan), membentuk tim proyek (pengorganisasian), mengarahkan pelaksanaan proyek (pengarahan), dan memantau kemajuan proyek (pengendalian).

Kritik: Teori ini dianggap terlalu mekanistik dan kurang memperhatikan aspek manusia.

3. Konsep dan Teori dalam Manajemen Publik

3 New Public Management (NPM)

Menekankan efisiensi, desentralisasi, dan pendekatan berbasis pasar dalam pelayanan publik.

New Public Management (NPM) muncul pada tahun 1980-an sebagai respons terhadap inefisiensi birokrasi tradisional. NPM menekankan:

1. Efisiensi: Mengadopsi praktik manajemen sektor swasta.
2. Desentralisasi: Memberikan otonomi kepada unit-unit lokal.
3. Orientasi Hasil: Fokus pada output dan outcome, bukan proses.
4. Privatisasi: Melibatkan sektor swasta dalam pelayanan publik.

Contoh: Program privatisasi BUMN di Indonesia, seperti PT Telkom, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

Kritik: NPM dikritik karena terlalu mengutamakan profit dan mengabaikan nilai-nilai publik seperti keadilan dan partisipasi

3. Konsep dan Teori dalam Manajemen Publik

Good Governance (tata kelola yang baik) adalah konsep yang menekankan prinsip-prinsip:

1. Transparansi: Keterbukaan informasi kepada publik.
2. Akuntabilitas: Pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan.
3. Partisipasi: Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan.
4. Responsivitas: Responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Contoh: Program e-government di Indonesia, seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4

Good Governance

Konsep ini menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dalam pengelolaan urusan publik.

Kritik Implementasi good governance sering terkendala oleh budaya korupsi dan rendahnya partisipasi masyarakat

3. Konsep dan Teori dalam Manajemen Publik

Mark Moore mengembangkan teori Public Value yang menekankan pada penciptaan nilai publik melalui:

1. Strategi Inovatif: Mengembangkan solusi kreatif untuk masalah publik.
2. Kolaborasi: Bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.
3. Hasil yang Berdampak: Menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Contoh: Program "Kartu Prakerja" di Indonesia, yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan berbasis digital.

5 Public Value Theory (Mark Moore)

Fokus pada menciptakan nilai publik melalui strategi yang inovatif dan kolaboratif.

Kritik: Teori ini dianggap sulit diukur karena nilai publik bersifat subjektif

3. Konsep dan Teori dalam Manajemen Publik

Network Governance menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini meliputi:

1. Kemitraan: Kerja sama antar-pemangku kepentingan.
2. Koordinasi: Menyelaraskan tujuan dan sumber daya.
3. Keberlanjutan: Memastikan program berkelanjutan.

Contoh: Program penanganan COVID-19 di Indonesia, yang melibatkan pemerintah, swasta (seperti perusahaan farmasi), dan masyarakat (relawan) dalam distribusi vaksin dan logistik.

Kritik: Network governance sering menghadapi tantangan koordinasi dan konflik kepentingan.

6

Network Governance

Menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Tujuan Manajemen Publik

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar kualitas yang tinggi.

2. Mencapai Efisiensi dan Efektivitas

Mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal.

4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

5. Mendorong Partisipasi Publik

Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program sesuai dengan kebutuhan mereka.

6. Menciptakan Nilai Publik (Public Value)

Menghasilkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara luas, seperti keadilan sosial, keamanan, dan kesejahteraan.

PENUTUP

Manajemen publik adalah disiplin ilmu yang terus berkembang seiring dengan perubahan tantangan dan kebutuhan masyarakat. Dengan memahami sejarah, definisi, konsep, dan tujuannya, kita dapat lebih baik dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan serta program yang bermanfaat bagi masyarakat